

KESAKTIAN PANCASILA DALAM MEMBANGUN KESADARAN DAN KEAMANAN BANGSA INDONESIA

Fathurrosi

Institut Agama Negeri (IAIN) Pontianak

rossirendra@gmail.com

Abstrak

Sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yakni dengan membumikan kesadaran bangsa Indonesia terhadap kesaktian dan keberadaan pancasila pada hati bangsa itu sendiri. Pancasila merupakan hasil dari para pendiri bangsa untuk menjawab dan mampu memberikan kehidupan yang saling menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan bangsa itu sendiri. Keberadaan pancasila sebagai dasar negara, ideology nasional, filsafat bangsa, juga sebagai kristalisasi dari prinsip dasar untuk Indonesia yang diyakini mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi bangsa serta mampu berdiri kokoh pada nilai-nilai pancasila itu sendiri. Oleh sebab itu, rekonstruksi serta membangkitkan kembali Pancasila seharusnya menjadi tujuan terdepan dalam pengentasan masalah yang sudah dibuat melalui program pemerintah, agar nilai Pancasila dapat dijiwai oleh setiap bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Pancasila dapat membebaskan rakyat dari perdebatan antarumat beragama, perbedaan suku, etnis, ras, dan golongan atau intoleransi terhadap sesama yang mayoritas maupun yang minoritas. Pada tulisan ini, penulis ingin membeikan pesan secara kontekstual mengenai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sehingga langkah untuk meredam persoalan tersebut bangsa Indonesia harus mengambil langkah yaitu membumikan kembali kesaktian pancasila dalam bumi khatulistiwa.

Kata Kunci: *kesaktian pancasila, pancasila,*

Pendahuluan

Sesuai dengan pengagas awal, Soekarno, Pancasila diusulkan sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para founding fathers menghendaki Pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pancasila secara sistematis disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofische grondslag, suatu pondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan bagi kokoh-tegaknya negara-bangsa, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau Leitstar, sebagai ideologi nasional,

sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional.

Begitu penting kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran yang tidak disangsikan. Dengan demikian rakyat rela untuk menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata; untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warganegara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tulisan ini menfokuskan pada persoalan-persoalan yang sedang terjadi pada bangsa Indonesia. Sehingga kontribusi yang ada pada tulisan ini merupakan kajian-kajian yang diambil dari sumber hukum negara yaitu Rekonstruksi Kesadaran Bangsa Indonesia dalam Membumikan Pancasila atau pandangan menurut Pancasila yang pada intinya penulis menginginkan bangsa Indonesia tetap berpegang teguh dalam kehidupan yang bersumber pada nilai-nilai pancasila dan agama yang sudah menjadi kenyakinannya masing-masing.

Sejarah Lahirnya Pancasila

Menurut Hamid Darmadi, 2010:251. Mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bangsa yang religius bangsa Indonesia yakin sebenar-benarnya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Oleh karena itu, maka urutan sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945 (2605, tahun Showa 20) yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka.

BPUPKI semula beranggotakan 70 orang (62 orang Indonesia dan 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang yang tidak berhak berbicara, hanya mengamati/ *observer*), kemudian ditambah dengan 6 orang Indonesia pada sidang kedua. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama empat hari bersidang ada tiga puluh tiga pembicara. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah "Penggali/Perumus Pancasila". Tokoh lain yang yang

menyumbangkan pikirannya tentang Dasar Negara antara lain adalah Mohamad Hatta, Muhammad Yamin dan Soepomo.

“Klaim” Muhammad Yamin bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 dia mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu *kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat*. oleh “Panitia Lima” (Bung Hatta cs) diragukan kebenarannya. Arsip A.G Pringgodigdo dan Arsip A. K. Pringgodigdo yang telah ditemukan kembali menunjukkan bahwa Klaim Yamin tidak dapat diterima. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan 5 asas yaitu *kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa*, yang oleh Soekarno dinamakan *Pancasila*, Pidato Soekarno diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya pancasila.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang berberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur. Berberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi
2. Hamidhan, wakil dari Kalimantan
3. I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara
4. Latuharhary, wakil dari Maluku.

Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

Pada tanggal 30 September 1965, adalah awal dari Gerakan 30 September (G30SPKI). Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hari itu, enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, memperingati bahwa dasar Indonesia, Pancasila, adalah sakti, tak tergantikan.

Berdasarkan sejarah lahirnya pancasila di atas, maka dapat diambil sebuah benang merahnya. Bahwa berdirinya bangsa Indonesia dan lahirnya Pancasila

merupakan keinginan bersama yang didasari atas kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme yang sudah banyak memberikan penderitaan terhadap bangsa ini. Sehingga akhirnya Pancasila bukan merupakan hasil dari setiap golongan, kelompok, agama, dan suku, atau tidak mengatasnamakan agama masing-masing, melainkan didasari atas tujuan kuat untuk kehidupan sejahtera dan mandiri.

Rekonstruksi Pancasila

Sesuai dengan penggagas awal, Ir Soekarno, Pancasila diusulkan sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para founding fathers menghendaki Pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pancasila secara sistematis disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofische grondslag, suatu pondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan bagi kokoh-tegakinya negara-bangsa, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau Leitstar, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional.

Begitu penting kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran yang tidak disangsikan. Dengan demikian rakyat rela untuk menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata; untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jika dilihat dari rekonstruksi Pancasila di atas, maka sebenarnya tujuan adanya dan berlakunya Pancasila yaitu untuk dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, mengingat masyarakat yang ada di Indonesia

merupakan masyarakat yang majemuk dimana setiap diantara mereka memiliki perbedaan kebudayaan yang dipercaya dan dijadikan dasar dalam kehidupannya. Untuk itu perlu kiranya bangsa Indonesia kembali kepada rekonstruksi pancasila yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa mulai Indonesia dalam penjajahan sampai mempertahankan kemerdekaan tersebut. Sehingga tidak ada lagi yang menganggap dan mengatasnamakan golongan atau agama yang paling benar menurutnya.

Manusia pada dasarnya ingin mencapai keseimbangan. Dimana jika hal tersebut dikaitkan dalam perspektif Pancasila yang menjelaskan tentang manusia dalam arti yang sebenarnya "bahwa manusia selalu menghendaki adanya keseimbangan, antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai anggota masyarakat, dan antara jasmani dan rohani", yang sering disebut sebagai "manusia seutuhnya".¹ Konsepsi manusia seutuhnya ini ternyata juga pernah dilontarkan oleh Tho Mas Jefferson pada abad ke-18. Yang memberi sebutan "the well-rounded man". Artinya "manusia yang bernar-benar bulat" islam juga banyak mengajarkan tentang keseimbangan ini, yaitu keseimbangan antara manusia sebagai makhluk yang harus selalu menyembah Sang Khaliq dan manusia sebagai khalifah (pemimpin, pengelola) di muka bumi. Keseimbangan antara hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan manusia (hablu minannas dan hablu minallah), keseimbangan antara kehidupan individu dan sosial. Keseimbangan antara IMTAQ dan IPTEK, dan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.

Jika melihat dengan permasalahan yang terjadi dengan bangsa Indonesia dan mangacu pada teori di atas, maka penulis memberikan kesimpulan dan sekaligus sebagai refleksi dalam kehidupan bangsa ini. Pertama, manusia ingin menikmati hak asasi, karena hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang dan bersifat universal. Kedua, konsep demokrasi merupakan konsep kebebasan setiap orang untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing, dengan demikian demokrasi bertujuan ingin menciptakan kehidupan yang lebih harmonis antar sesama manusia. Ketiga, pendidikan merupakan pilar dasar atas berdirinya hak asasi dan demokrasi. Artinya, pendidikan merupakan upaya sadar yang paling efektif untuk menegakkan kehidupan yang diamanahkan dalam pancasila dan UUD 1945. Disinilah kenapa sangat penting sekali untuk membuat sebuah rekonstruksi atau susunan pancasila dalam tatanan kehidupan yang kiranya dapat memnjadi jembatan bagi kehidupan bangsa dan negara.

Kesaktian Pancasila Dalam Bumi Khatulistiwa

Kesaktian Pancasila merupakan sebuah momentum penting bagi bangsa Indonesia, dimana Pancasila telah membuktikan kesaktiannya yang tidak bisa tergantikan oleh ideologi apapun. Kekuatan Pancasila yang luar biasa telah bisa

¹ Ahmad Sonhadji, *Manusia, dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), h. 3

menghancurkan kekuatan ideologi Komunis di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa paham komunis yang diciptakan oleh Karl Marx ini telah banyak menghancurkan para pejuang bangsa Indonesia seperti para jenderal, ulama, dan santri sehingga pemahaman tentang komunis ini jangan sampai mewarisi para anak-anak bangsa. Hal ini dikarenakan karena pemahaman tentang komunis itu sendiri sebagai bentuk pemahaman kebencian terhadap agama.

Sebenarnya kesaktian yang terkandung dalam pancasila adalah tidak membedakan perbedaan yang terjadi pada bangsa Indonesia, sebut saja perbedaan suku, ras, etnis, agama, dan budaya. Bagi pancasila semua itu adalah bagian dari keistimewaan bangsa Indonesia dimana negara-negara lain tidak memiliki keistimewaan tersebut. Disamping itu, pancasila diyakini bisa memberikan persoalan-persoalan bangsa baik bersifat local, nasional maupun internasional.

Komunisme menganggap agama sebagai sesuatu yang menghalangi setiap kegiatan mereka terutama berkaitan dengan penguasaan suatu Negara. Tentunya pemahaman ini sangat tidak relevan dengan sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mengharuskan segala tindakan kita sesuai dengan agama. Oleh karena itu, komunisme tidak bisa hidup di Indonesia karena sangat bertentangan dengan dasar Negara yang telah tertanam kuat di Indonesia sejak era proklamasi yaitu Pancasila. Jika kita kaitkan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini, ajaran tentang komunisme ini telah banyak merasuk kedalam jiwa anak bangsa Indonesia. Banyak diantara mereka yang bertindak jauh dari nilai-nilai agama seperti membunuh, memperkosa, tawuran, penganiayaan, dan lainnya. Hal tersebut telah membuat miris para pelaku pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.

Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan dengan berita-berita tentang siswa yang dengan tega menganiaya bahkan sampai membunuh gurunya, seperti contoh salah satu siswa di SMKN 2 Makassar yang dengan tega memukuli gurunya gara-gara dia ditegur tidak membawa buku gambar, ditambah lagi dia mengajak orang tua nya untuk menganiaya gurunya. Tentu hal ini mengundang keprihatinan bahwa orang tua yang seharusnya mengajarkan perilaku yang baik justru sangat kontradiktif. Padahal jika dilihat dari inti permasalahannya sangatlah sepele dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi, tindakan seperti itu seolah-olah suatu tindakan yang biasa saja dan hanya melampiaskan emosi sesaat. Tindakan tersebut tentu tidak mencerminkan perilaku agama. Pancasila dianggap memiliki kesaktian karena memuat dan mengandung beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut;

Kedudukan Pancasila

Pancasila dan berkembang seiring dengan adanya bangsa Indonesia, yang meliputi lima sila-sila nilai dasar pancasila yang luhur dan menjadi kekuata dan semangat penggerak perjuangan bangsa saat melakukan perlawanan penjajah

kolonialis yang menjajahnya. Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi sikap dan cermin serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila secara formal disahkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia oleh PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pada prinsipnya kedudukan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut;

Secara filosofis pancasila tidak hanya berkedudukan dalam negara Indonesia, melainkan sebagai upaya bangsa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila itu sendiri. Dimana nilai ketuhan termasuk kepercayaan yang tidak boleh dijadikan alasan dasar untuk membenarkan agamanya sendiri dan mengabaikan agama lain. Nilai kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial juga mengandung dan memberikan gambaran bagaimana bangsa ini menjunjung tinggi hak asasi dan demokrasi secara menyeluruh dalam semua lapisan masyarakat.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup bagi suatu bangsa diperlukan jika bangsa tersebut ingin kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dengan pandangan hidupnya suatu bangsa akan memandang permasalahan yang dihadapinya dan menentukan arah serta bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup ibarat sebatang pohon yang senantiasa condong kemana angin bertiup, artinya bangsa tersebut akan terombang ambing dalam permasalahan besar, banyak nan kompleks, baik permasalahan dalam masyarakat sendiri terlebih permasalahan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain sedunia. Dengan pandangan hidup yang jelas bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman untuk menemu kenali dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan, dan hukum. Dengan pandangan hidup sebagai pedomannya suatu bangsa membangun dirinya.

Pandangan hidup mengandung konsep dasar kehidupan yang diciptakan oleh bangsa, termuat pikiran-pikiran terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik, yang akan membawa hidup dan kehidupan bangsa pada tujuan bersama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang pluralis dan multikultural serta memberikan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur tersebut merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri dan diyakini kebenarannya.²

² Poespowardojo, S. *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992), h. 19

Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas serta kehidupan di segala bidang. Ia juga berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menata kehidupan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah monodualistis, oleh karenanya dalam menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidupnya senantiasa mengembangkannya sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial untuk mewujudkan kehidupan bersama menuju pandangan hidup berbangsa dan bernegara yakni Pancasila.³

Martabat bangsa diartikan sebagai kelompok masyarakat yang bersamaan asal usul keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa Indonesia memiliki keunikan, yang dalam banyak hal berada dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Keunikan ini mewarnai karakteristik bangsa Indonesia di masa depan. Tentu disepakati agar Indonesia berupaya menjadi suatu bangsa yang bermartabat, yaitu bangsa yang sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Ada beberapa pranata yang harus diperkuat agar kita menjadi bangsa yang terhormat di dunia global, yaitu pranata-pranata filosofis, politik, ekonomi, teknologi, hukum, etika, sosial, dan kultural.

Dari beberapa teori di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa setiap negara di muka bumi ini harus memiliki komitmen untuk negaranya sendiri, jika negara tersebut tidak memiliki komitmen maka akan terombang-ambing dengan arus globalisasi dan tidak memiliki paradigma yang sama. Pandangan inilah yang diharapkan tetap eksis dan mampu menjunjung tinggi ideology negara berdasarkan sumber hukum yang berlaku.

Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Ini mengandung pengertian setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai sumber peraturan negara berupa hukum yang berlaku.

Bung Karno pernah mengatakan dalam Pidatonya. Pancasila itu buah ciptaannya; dengan perkataan: "saya bukanlah pencipta pancasila, saya bukan pembuat pancasila. Apa yang saya kerjakan tempo hari ialah sekedar memformulir perasaan-perasaan yang ada dikalangan rakyat dengan beberapa kata yang saya namakan " Pancasila". Saya sekedar menggali didalam bumi Indonesia dan mendapatkannya lima berlian, dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita ini dengan cara seindah-indahnya " (Pidato, 17 Agustus 1945).

Sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila adalah sumber motivasi inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus stadar

³ Oesman U, *Pancasila Sebagai Ideologi*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992), h. 20

pembenarannya. Dengan demikian gerak ide, pola aktivitas, perilaku serta hasil perilaku tersebut (ide, praktik perilaku dan hasil perilaku) menggambarkan bentuk atau wujud budaya bangsa. Pancasila dalam pengertian sebagai moral, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, seperti dijelaskan dalam teori Von Savigny, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang disebut dengan "Volkgeist" (jiwa rakyat/bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia (keberadaannya/ lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia).

Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dalam arti, bahwa jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis (tidak bisa berubah) dan mempunyai arti dinamis (bergerak). Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah-laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah-laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas, sehingga menjadi identitas bangsa. Ciri-ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian. Kepribadian dan Identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila.

Kedudukan sebagai dasar Negara secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan sumber hukum nasional. Pancasila selalu dikukuhkan dalam konstitusi. Pancasila selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerokhaniaan Negara. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai dasar negara dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara termasuk para penyelenggara parpol memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pancasila sebagai sumber spirit/semangat bagi UUD 1945, Penyelenggara Negara, pelaksana pemerintahan dan seluruh penyelenggara ormas dan parpol.

Berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa tata hukum yang berlaku di Indonesia, dimulai dari UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, Keppres, Perda, hingga peraturan Desa harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Bilamana tidak maka kaidah-kaidah hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku di Indonesia, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Demikian halnya dengan UUD 1945, meskipun UUD 1945 merupakan kaidah hukum yang tertinggi dalam kehidupan bernegara, isinya harus sesuai dengan Pancasila, termasuk diantaranya isi perubahan-perubahan (amandemen) yang telah dilakukan oleh DPR pada tahun 2000 hingga 2003.

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Falsafah adalah merupakan perwujudan dari watak dan keinginan dari suatu bangsa (rakyat dan bangsanya) sehingga segala aspek kehidupan bangsa harus sesuai dengan falsafahnya. Falsafah suatu bangsa adalah kristalisasi dari

nila-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya, menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Dari sudut pandang falsafah, pancasila dipahami sebagai *philosophical way of thinking* atau *philosophical system*, yaitu pancasila bersifat objektif ilmiah karena uraiannya bersifat logis dan dapat diterima oleh paham yang lain.⁴

Bangsa Indonesia telah memiliki falsafah yang kuat yaitu Pancasila. Dalam pancasila manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai anggota masyarakat, dan antara hidup materi dan rohani. Mengatakan manusia tidak dilihat dari satu segi saja, tetapi sebagai “manusia bulat” atau “manusia seutuhnya” sanyangnya, falsafah pancasila ini kurang mendapatkan tempat untuk dikaji dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian hukum yang berlaku yang menjadi norma dalam Negara. Dalam perjalanan bangsa dan Negara Indonesia, pancasila sebagai dasar Negara tercantum dalam ketentuan tertinggi meskipun dituangkan dalam rumusan yang berbeda. Dalam tiga UUD yang kita miliki, Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan dalam mukadimah Undang-undang sementara Republik Indonesia 1950, Pancasila tetap tercantum di dalamnya.

Pancasila Sebagai Sumber Nilai

Pengertian nilai sangat bervariasi, sehingga sulit untuk mencari kesimpulan yang komprehensif agar mewakili setiap kepentingan dan berbagai sudut pandang. Meskipun demikian terdapat hal yang disepakati semua pengertian nilai, bahwa nilai berhubungan dengan manusia, dan nilai merupakan sesuatu yang penting. Untuk mengetahui betapa bervariasi pengertian nilai tersebut, terutama bagaimana hubungan antara setiap pengertian itu dengan pendekatan-pendekatan pendidikan nilai dan pembudayaan nilai, dibawah ini akan dikemukakan sejumlah definisi yang diharapkan mewakili berbagai sudut pandang. Menurut Dardji Darmodihardjo (1986: 36) nilai adalah yang berguna bagi kehidupan manusia jasmani dan rohani.

Teori di atas menegaskan tentang pengertian nilai secara umum yang berguna dalam setiap kehidupan manusia, itu sebabnya nilai merupakan dasar bagi keberadaan manusia itu sendiri. Sedangkan makna nilai yang terkandung dalam pancasila adalah sebagai berikut:

Makna Nilai dalam Pancasila

⁴ Frondizi, R. *Pengantar Filsafat Etika*, Terjemahan Cuk Ananta Wijaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2001), h. 22

Pancasila telah diterima sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai ketuhanan yang maha esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. *Causa Prima*, "sangkan paraning jumadi" (asal dan tempat kembali kejadian). Dengan nilai ketuhanan yang dimilikinya dapat dinyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan Bangsa yang atheis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, menghormati kerdekaan beragama, tidak ada paksaan sarta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu Hal sebagaimana meatinnya. Nilai Kemanusiaan berarti menepatkan manusia pada posisi penting, sebagai "kholifah" dengan menjunjung keadaban, dan menghindari kebiadaban.

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme, patriotisme, manjungjung wawasan kebangsaan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, mengakui perbedaan sebagai kenyataan, dan kekayaan bangsa yang mengandung keunggulan.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui Lembaga-Lembaga perwakilan. Nilai Kerakyatan berarti mengakui bahwa rakyatlah sesungguhnya yang memiliki kedaulatan tertinggi, dan mempercayakan atau mengamanahkannya pada wakil-wakilnya dalam pelaksanaan.

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang

⁵ Depdiknas, *Naskah-Naskah Akademik Pembudayaan Nilai Pancasila*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Taman Kanak dan Sekolah Dasar, 2006),

Adil dan Makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu Sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar di atas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.

Bung Karno pernah mengatakan dalam pidatonya. "Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan tuhan sendiri. Yang Kristen menyembah tuhan menurut petunjuk Isa Alamsih. Yang islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tidak ada egoisme agama. Marilah kita amalkan jalannya agama baik islam maupun Kristen dan budha. Dengan cara berkesadaran. Apakah cara yang berkeadaan itu ? ialah hormat menghormati antara satu sama yang lain.

Kalimat di atas Presiden RI pertama Sukarno menegaskan secara terang-terangan terkait dengan keberadaan nilai-nilai ketuhan dalam sila-sila pancasila. Yang mana pernyataan tersebut mengingatkan kepada kita kembali bahwa sesungguhnya bangsa dan negara ini tidak boleh untuk lalai ataupun melupakan sejarah lahirnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dimana pancasila memiliki peran penting dalam mengatur dan menghilangkan intoleransi antar umat beragama, antar suku, etnis, ras, dan golongan. Seperti akhir-akhir ini bangsa Indonesia dikagetkan dengan adanya kejadian terror terhadap para Ulama Indonesia. Hal tersebut sudah membuat ketidaknyamanan umat islam khususnya orang yang menyandang kyai atau ustadz.

Sementara itu, menteri agama Republik Indonesia tahun 1951 Haji Agus Salim mengatakan dalam pidatonya yang menjelaskan tentang "dapatkan dengan asas-asas ketuhanan yang Maha Esa itu. Kita mengakui kemerdekaan keyakinan orang yang meniadakan tuhan, atau keyakinan agama yang mengakui Tuhan berbilang atau berbagi-bagi. Tentu dan pasti. Sebab, Undang-undang Dasar kita sebagai juga Undang-undang tiap negara yang mempunyai kesopanan dan menjamin keyakinan agama. Asal jangan melanggar hak-hak dan pergaulan orang masing-masing. Intinya adalah bahwa, bahkan terhadap kegiatan mereka yang meniadakan tuhanpun dan yang beragama ketuhanan berbagi-bagi. Tidaklah tuhan menghendaki kita melakukan paksaan bahkan tidakpun dibebankan pada kita.

Pernyataan Haji Agus Salim sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama islam yang mana jauh sebelum itu di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Dalam surah Fatir Ayat 18 yang berbunyi.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya, Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu).

Di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan bil ghaib dalam ayat ini ialah orang-orang yang takut kepada Allah di waktu rahasia atau terang-terangan. Rasa takut dari seorang hamba membuatnya beramal agar tidak disiksa karena menyia-nyiakan yang diperintahkan serta menghindarkan diri dari mengerjakan sesuatu yang mendatangkan azab. Mereka inilah yang mau menerima peringatan dan memperoleh manfaat darinya. Maksud mendirikan shalat adalah melaksanakannya dengan batasan-batasannya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta melaksanakan kewajibannya dan melakukan kekhusyuan di dalamnya. Shalat yang dilakukannya itu dapat mengajaknya kepada kebaikan dan mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar.

Dari berbagai aib, seperti riyaâ, sombong, dusta, menipu, membuat makar, melakukan kemunafikan dan akhlak tercela lainnya, serta menghiasi dirinya dengan akhlak mulia seperti ikhlas, tawadhuâ, jujur, bersikap lembut, dan memberikan ketulusan kepada manusia (tidak menipu), selamatnya dada dari dengki dan dendam, serta akhlak buruk lainnya, maka pembersihan dirinya itu manfaatnya untuk dirinya sendiri sebagaimana dierangkan dalam lanjutan ayatnya. Dia akan menghisab amal yang dikerjakan makhluk-Nya dan akan memberikan balasan. Dia sama sekali tidak akan meninggalkan amal yang besar maupun yang kecil.

Jika dilihat dari ayat dan pernyataan tokoh besar Indonesia di atas, maka setiap kejadian yang menimpa bangsa Indonesia sudah merupakan motif atau unsur dari adanya kekhawatiran antar umat beragama sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dalam kehidupan yang pluralis ini, dimana setiap mereka ingin melindungi dan menyelamatkan kehidupan mereka masing-masing yang dulu bangsa Indonesia dikenal dengan kehidupan yang harmonis dengan keragaman suku yang ada. Namun akhir-akhir ini semua itu mulai mengalami dekadensi toleransi.

Pancasila Sebagai Sistem Etika

Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" berarti watak, keharusan, dan adat. Pengertian yang diberikan Magna Suseno menyatakan etika merupakan pengkajian filsafat tentang bidang yang menyangkut kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan buruk.

Bangsa yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi akan dihormati oleh bangsa lain. Sebaliknya bangsa yang etika dan moralitasnya rendah akan dipandang rendah pula oleh bangsa lain. Etika dan moralitas ini berkaitan dengan sifat dan sikap kejujuran, keadilan, kesantunan, kesopanan, kesabaran, kedisiplinan, ketertiban, kepekaan, kebersamaan, serta saling menghormati satu sama lain.⁶

Etika merupakan ciri khas atau cara yang dimiliki setiap negara yang menunjukkan perbedaan negara satu dengan negara lain, dengan demikian orang akan mengenal pola interaksi yang dimiliki bangsa itu sendiri. Indonesia salah satu negara yang selalu menjunjung tinggi etika yang berdasarkan nilai-nilai pancasila yang terkandung sebagai consensus untuk mengatur hubungan antara negara dan warganegara.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Secara etimologi kata ideologi berasal dari bahasa Yunani "*idea*" artinya raut muka, gagasan, buah pikir dan logika. Hal ini berarti ajaran. Pertama kali istilah ideology ini diintrodusir oleh A. Destult de Tracy. Ideologi merupakan bagian dari filsafat ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran (*idein*= melihat, *logia*= kata, ilmu atau ajaran). Mengutip pendapat Alfian, ideology adalah pandangan hidup atau filsafat yang berisi serangkaian nilai-nilai (norma) atau system nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai dasar tersebut biasanya bersumber pada budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsa, berakar dan hidup dalam realita kehidupan mereka, terutama pada waktu mereka melakukan konsensus untuk menjadikannya ideologi.

Pengertian kata ideologi secara harfiah berarti *a system of ideas* yakni suatu rangkaian ide yang terpadu menjadi satu. Dalam perkembangannya terdapat banyak pengertian tentang ideologi yang dikemukakan para pakar. Ideologi sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.⁷ Thompson (1984) menjelaskan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu system yang teratur.

⁶ Ahmad Sonhadji, *Manusia, dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), h. 91

⁷ Poespowardojo, S. *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992), h. 47

Ideologi merupakan seperangkat asumsi dasar baik normatis maupun empiris mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik. Dengan demikian ideology merupakan seperangkat prinsip pengarah (guiding principle) yang dijadikan dasar, memberi arahan dan tujuan yang akan dicapai di dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan Negara serta menjelaskan ideologi sebagai suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma. Ideologi sebagai seperangkat gagasan yang menjelaskan atau melegalisasikan.⁸

Table 1.1
Perbandingan antara Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

No	Ideology Terbuka	Ideology Tertutup
1	Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, hasil musyawarah dan consensus masyarakat, milik seluruh rakyat. Oleh karena itu sekaligus sebagai kepribadian masyarakat	Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan membarui masyarakat. Dibenarkan atas nama ideology, masyarakat harus berkorban. Kepercayaan dan kesetiaan ideology yang kaku.
2	Bersifat dinamis dan reformis. Ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan.	Bukan merupakan nilai-nilai dan cita-cita. Terdiri atas tuntutan konkrit dan operasional yang diajukan secara mutlak.
3	Isinya tidak operasional, menjadi operasional bila diwujudkan dalam konstitusi	Adanya ketaatan yang mutlak, bahkan kadang dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan
		Atas nama ideology dibenarkan pengorbanan-pengorbanan dibebankan kepada masyarakat.

Tabel di atas sebenarnya memberikan gambaran yang sebenarnya bahwa ideologi merupakan hasil dari bangsa itu sendiri yang secara khusus bisa kita sebut dari para pejuang bangsa yang rela berkorban untuk mendirikan bangsa Indonesia itu sendiri. Berbeda halnya dengan ideology tertutup yang merupakan hasil dari golongan dan sekelompok orang dengan mengatasnamakan ideology

⁸ Newmann, F.M., *Education For Citizen Action*, (California: Mc. Cuthan Publishing Corporation, 1975), p. 52

dan hak asasi manusia, tetapi bukan merupakan nilai-nilai yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Penutup

Pada era globalisasi, Indonesia harus menata kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memposisikan kembali kedudukan dan fungsi pancasila. Dalam kehidupan sekarang ini, ada kekhawatiran terjadinya desintegrasi bangsa serta lunturnya jiwa dan nilai-nilai luhur bangsa atau pancasila baik karena faktor internal maupun karena pengaruh luar. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini membuat kita sangat prihatin dan sekaligus mengundang kita untuk bertanggungjawab. Kkrisis toleransi, Perbedaan kepercayaan, budaya, kepemimpinan, moral, dan kepentingan kelompok membuat bangsa Indonesia ini kehilangan orientasi nilai-nilai luhur bangsa yaitu pancasila.

Referensi

- Alfian, 1992. Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik. Jakarta: BP-7Pusat.
- Depdiknas, 2006. Naskah-Naskah Akademik Pembudayaan Nilai Pancasila. Jakarta: Direktorat Pembinaan Taman Kanak dan Sekolah Dasar.
- Fronidizi, R. 2001 Pengantar Filsafat Etika, Terjemahan Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajara
- Hakam, K.A. 2000. Pendidikan Nilai. Bandung: Value Press
- Hakam, K.A 2005. Nilai Sosial Budaya Dalam Pendidikan Umum. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Kartohadiprodjo, S. 1983. Pancasila dan/ Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Bina Cipta.
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB). 2005. Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara. Jakarta: PT Cipta Prima Budaya.
- Moediono, 1992. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Mahkamah Konstitusi, 2009. Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif. Jakarta: Setjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Newmann, F.M. 1975. Education For Citizen Action. California: Mc. Cutchan Publishing Corporation.
- Notonagoro, 1984. Pancasila Dasar Filsafah Negara. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Notonagoro, 1971. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara
- Oesman, U. 1992. Pancasila Sebagai Ideologi. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Poespowardojo, S. 1992. Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Ahmad, Sonhadji, 2012. Manusia, dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru. Malang: Universitas Negeri Malang
- Republika, 2006. "KBRI Bangkok Selenggarakan Temu Bisnis"
- Tim Penyusun, 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Pradnya Paramita